

LAPORAN PENGELOLAAN RISIKO TRIBUNAN IV TAHUN 2023



DINAS KESEHATAN
KABUPATEN LAMONGAN



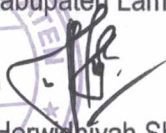
PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
DINAS KESEHATAN

Jalan Dr.Wahidin Sudiro Husodo Nomor 57 Lamongan Kode Pos :62211

Telp.(0322) 321338, Fax 0322 321 338

E-mail :dinkes@lamongan.go.id Web Site : www.lamongankab.go.id

NO DOKUMEN	:	
TANGGAL TERBIT	:	2023

Disiapkan Oleh	:	Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi  <u>ACHMAD SUGIANTORO,SH,MM</u> NIP.19740119 199403 1 002
Diperiksa	:	Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Lamongan - NIP.
Disahkan Oleh	:	Plt.Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Lamongan  <u>dr.Herwidiyah Shidayatri</u> NIP.19720920 200212 2 002 

I. PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pengertian manajemen risiko suatu proses identifikasi, analisis, penilaian, pengendalian, dan upaya menghindari, meminimalisir atau bahkan menghapus risiko yang tidak dapat diterima. Risiko berhubungan dengan pendekatan atau metodologi dalam menghadapi ketidakpastian, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) arti kata risiko adalah akibat yang kurang menyenangkan dari suatu tindakan. Ketidakpastian ini berupa ancaman, pengembangan strategi dan mitigasi risiko. Manajemen risiko adalah suatu proses perencanaan, pengaturan, pimpinan, dan pengontrolan aktivitas sebuah organisasi. Penilaian risiko, pengembangan strategi untuk mengelolanya dengan menggunakan pemberdayaan/pengelolaan sumberdaya. Manajemen risiko juga dapat disebut sebagai salah satu cara untuk mengorganisir suatu risiko yang nantinya akan dihadapi baik itu sudah diketahui atau belum diketahui yang tidak terpikirkan dengan memindahkan risiko kepada pihak lain atau mengurangi efek negatif dari risiko dan menampung baik sebagian atau semua konsekuensi risiko dari beberapa aktifitas manusia. Dimana proses manajemen risiko yg meliputi penilaian risiko, pengembangan strategi untuk mengelolanya dengan menggunakan pemberdayaan/pengelolaan sumberdaya. Oleh sebab itu melalui manajemen risiko diharapkan ketidakpastian yang menimbulkan kerugian dapat diminimalisir atau bahkan dapat dihilangkan karena setiap kegiatan pasti ada risiko yang akan ditimbulkan.

Selanjutnya manajemen risiko pada Dinas Kesehatan Kabupaten Lamongan dijadikan sebagai pengendalian dan upaya untuk menghindari, meminimalisir, bahkan menghapus risiko yang dapat ditimbulkan dari setiap kegiatan.

B. DASAR HUKUM

1. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890).
2. Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko pada Pemerintah Daerah ;
3. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 39 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan ;
4. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 37 Tahun 2011 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan ;
5. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 17 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan.

C. MAKSUD DAN TUJUAN

Manajemen risiko diterapkan dengan maksud untuk menyediakan informasi risiko bagi organisasi sehingga organisasi dapat melakukan upaya agar risiko tersebut tidak terjadi atau mengurangi dampaknya. Penerapan manajemen risiko khususnya pada Unit Pemilik Risiko Tingkat Eselon II serta Unit Pemilik Risiko Tingkat Eselon III dan IV bertujuan untuk :

- a. Mengelola risiko dalam mencapai sasaran strategis organisasi pemerintah ;
- b. Meningkatkan kemungkinan pencapaian sasaran strategis organisasi dan peningkatan kinerja;
- c. Mendorong manajemen yang proaktif dan antisipatif ;
- d. Memberikan dasar yang kuat bagi pengambilan keputusan dan perencanaan;
- e. Meningkatkan kepatuhan terhadap regulasi ;
- f. Meningkatkan ketahanan organisasi ;
- g. Meningkatkan efektivitas alokasi dan efisiensi penggunaan sumber daya organisasi serta meningkatkan kepercayaan para pemangku kepentingan.

D. RUANG LINGKUP

Manajemen risiko pada Dinas Kesehatan Kabupaten Lamongan dilakukan dengan ruang lingkup dokumen, sumber daya manusia, dan lingkungan yang meliputi :

- a. Penentuan konteks kegiatan yang akan dikelola risikonya ;
- b. Identifikasi risiko ;
- c. Analisis risiko ;
- d. Evaluasi risiko ;
- e. Pengendalian risiko ;
- f. Pemantauan dan telaah ulang ;
- g. Koordinasi dan komunikasi.

II. RENCANA DAN REALISASI KEGIATAN PENGELOLAAN RISIKO

A.RENCANA KEGIATAN PENGELOLAAN RISIKO TRIBULAN III

Dinas kesehatan Kabupaten lamongan telah menyusun kegiatan – Kegiatan pengendalian terhadap risiko – risiko yang dilaksanakan pada Tribulan III sebagaimana terlampir.

B.RENCANA KEGIATAN PENGELOLAAN RISIKO TRIBULAN III

Dinas Kesehatan kabupaten lamongan telah melaksanakan kegiatan - kegiatan pengendalian terhadap risiko – risiko yang dilaksanakan pada Tribulan III sebagaimana terlampir

III. HAMBATAN PELAKSANAAN KEGIATAN

Uraian dan analisis hal-hal yang menjadi kendala atau hambatan dalam pelaksanaan kegiatan pengendalian atau hal-hal yang menyebabkan terjadinya gap antara rencana dan realisasi kegiatan pengelolaan risiko antara lain Keterbatasan kapasitas ASN pengelola manajemen risiko sehingga menjadi penghambat dalam merumuskan rencana tindak pengendalian terhadap risiko yang ada.

IV. MONITORING RISIKO DAN RTP

Dari hasil monitoring atas pengomunikasian risiko dan RTP, keterjadian risiko, pelaksanaan RTP dan kegiatan pemantauan RTP pada triwulan III dan dari hasil monitoring ini juga dapat dianalisa bahwa belum perlu dilakukan pemutakhiran risiko dan RTP untuk periode triwulan berikutnya, dari hasil capaian kinerja yang sudah terealisasi menandakan bahwa risiko sudah dapat di minimalisir dan sisa risiko dapat diselesaikan pada triwulan IV. Sehingga Rencana tindak pengendalian yang sudah ada untuk terus dilaksanakan sesuai dengan jadwal rencana yang sudah ditentukan sampai dengan akhir tahun.

V. PENUTUP

Dari hasil pelaksanaan kegiatan-kegiatan pengendalian terhadap risiko yang dilaksanakan pada periode triwulan III dapat disimpulkan bahwa sebagai tindak lanjut dari monitoring pengelolaan risiko pada periode ini sebagai upaya perbaikan. Selain itu peranan unit pengendali risiko sangat penting dalam pengelolaan risiko di mulai dari identifikasi risiko, pelaksanaan kegiatan, penyusunan rencana tindak pengendalian dan pemantauan. Sebagai tindak lanjut dari monitoring pengelolaan risiko periode selanjutnya guna meningkatkan kinerja kami akan melakukan evaluasi dan review terhadap rencana tindak pengendalian secara terpadu serta peningkatan kapasitas SDM pengelola Risiko.

LAMPIRAN

Formulir Kertas Kerja

Rancangan Pemantauan Atas Pengendalian Internal

Nama Pemda : Pemerintah Kabupaten Lamongan
Tahun Penilaian : 2023
Tujuan Strategis Pemda
Urusan Pemerintahan : Kesehatan
Dinas Terkait : Dinas Kesehatan

No	Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan	Bentuk/Metode Pemantauan yang Diperlukan	Penanggung Jawab Pemantauan	Rencana Waktu Pelaksanaan Pemantauan	Realisasi Waktu Pelaksanaan	Keterangan
Risiko Strategis OPD Dinas Kesehatan:						
1	1.Pemberian PMT balita Gizi buruk 2.Aksi bergizi melalui inovasi Ferameg(fe hari rabu pada remaja putri) 3.Pemanatuan EPBGGM 4.Melaksanakan On Job Training pada Nakes 5.Memberikan jaminan kesehatan masyarakat melalui LASERKU 6.Pemantauan PD3I melalui aplikasi ASIK 7.Posbindu PTM skrining pada penderita DM dan HT pemantauan pelaporan 8.Pelaksanaan Reakreditasi Puskesmas	Laporan pelaksanaan dan pemantauan berkelanjutan melalui Sarana komunikasi (WA)sosialisasi,rapat koordinasi	Sekretaris Dinas kesehatan	TB 1,2,3,4	TB 1,2,3,4	Terlaksana
2	1.Sosialisasi pada nakes 2.pemetaan data nakes 3.Perijinan online mempercepat birokrasi 4.Uji kompetensi pada nakes	Laporan pelaksanaan dan pemantauan berkelanjutan melalui Sarana komunikasi (WA)sosialisasi,rapat koordinasi	Sekretaris Dinas kesehatan	TB 1,2,3,4	TB 1,2,3,4	Terlaksana
3	1.Pengentrian pengadaan alkes dan obat melalui aplikasi syrup 2.Pemantauan LPLPO dan stok opname tiap akhir bulan	Laporan pelaksanaan dan pemantauan berkelanjutan melalui Sarana komunikasi (WA) sosialisasi,rapat koordinasi	Sekretaris Dinas kesehatan	TB 1,2,3,4	TB 1,2,3,4	Terlaksana

4	Kegiatan pemberdayaan di masyarakat melalui posyandu balita ,posyandu remaja,posyandu Lansia dan Posbindu PTM	Laporan pelaksanaan dan pemantauan berkelanjutan melalui Sarana komunikasi (WA)sosialisasi,rapat koordinasi	Sekretaris Dinas kesehatan	TB 1,2,3,4	TB 1,2,3,4	Terlaksana
---	---	---	----------------------------	------------	------------	------------

Risiko Operasional OPD Dinas Kesehatan:

1	Penguatan dari atasan kepada semua bidang u laporan tepat waktu	Laporan pelaksanaan dan pemantauan berkelanjutan melalui Sarana komunikasi (WA)sosialisasi,rapat koordinasi	Sekretaris Dinas kesehatan	TB 1,2,3,4	TB 1,2,3,4	Terlaksana
2	Kerangka Acuan Kerja Perencanaan Kegiatan,Dokumen Renja dan entri aplikasi SIRUP awal tahun dan perubahan	Laporan pelaksanaan dan pemantauan berkelanjutan melalui Sarana komunikasi (WA)sosialisasi,rapat koordinasi	Sekretaris Dinas kesehatan	TB 1,3	TB 1,3	Terlaksana
3	Kerangka Acuan Kerja Renja dan entri aplikasi SIRUP awal tahun dan perubahan	Laporan pelaksanaan dan pemantauan berkelanjutan melalui Sarana komunikasi (WA)sosialisasi,rapat koordinasi	Sekretaris Dinas kesehatan	TB 1,3	TB 1,3	terlaksana
4	Melaksanakan inventarisasi kebutuhan	Laporan pelaksanaan dan pemantauan berkelanjutan melalui Sarana komunikasi (WA)sosialisasi,rapat koordinasi	Sekretaris Dinas kesehatan	TB 1,4	TB 1,4	terlaksana
5	Kerangka Acuan Kerja Renja dan entri aplikasi SIRUP awal tahun	Laporan pelaksanaan dan pemantauan berkelanjutan melalui Sarana komunikasi (WA)sosialisasi,rapat koordinasi	Sekretaris Dinas kesehatan	TB 1,3	TB 1,3	terlaksana
6	Updating aplikasi simela	Laporan pelaksanaan dan pemantauan berkelanjutan melalui Sarana komunikasi (WA)sosialisasi,rapat koordinasi	Sekretaris Dinas kesehatan	TB 1,2,3,4	TB 1,2,3,4	terlaksana

7	Kerangka Acuan Kerja Renja dan entri aplikasi SIRUP awal tahun	Laporan pelaksanaan dan pemantauan berkelanjutan melalui Sarana komunikasi (WA)sosialisasi,rapat koordinasi	Sekretaris Dinas kesehatan	TB 1,3	TB 1,3	Terlaksana
8	Koordinasi lintas sektor PMK 30 th 2022 tentang mutu pelayanan ,PMK 34 th 2019 tentang puskesmas	Slaporan pelaksanaan dan pemantauan berkelanjutan melalui Sarana komunikasi (WA)sosialisasi,rapat koordinasi	Sekretaris Dinas kesehatan	TB 1,2,3,4	TB 1,2,3,4	Terlaksana
9	Penguatan dari atasan kepada semua bidang u laporan tepat waktu Peningkatan kapasitas tenaga Kesehatan	Laporan pelaksanaan dan pemantauan berkelanjutan melalui Sarana komunikasi (WA)sosialisasi,rapat koordinasi	Sekretaris Dinas kesehatan	TB 1,2,3,4	TB 1,2,3,4	terlaksana
10	Penambahan jaringan dan aplikasi penguatan dari atas dalam sinkronisasi satu data	Laporan pelaksanaan dan pemantauan berkelanjutan melalui Sarana komunikasi (WA)sosialisasi,rapat koordinasi	Sekretaris Dinas kesehatan	TB 1	TB 1	terlaksana
11	Pembinaan RS dan akreditasi Fasyankes	Laporan pelaksanaan dan pemantauan berkelanjutan melalui Sarana komunikasi (WA)sosialisasi,rapat koordinasi	Sekretaris Dinas kesehatan	TB 1,2,3,4	TB 1,2,3,4	terlaksana
12	Pembinaan nakes	Laporan pelaksanaan dan pemantauan berkelanjutan melalui Sarana komunikasi (WA)sosialisasi,rapat koordinasi	Sekretaris Dinas kesehatan	TB 3,4	TB 3,4	-terlaksana
13	Anjab,Bimtek tenaga kesehatan	Laporan pelaksanaan dan pemantauan berkelanjutan melalui Sarana komunikasi (WA)sosialisasi,rapat koordinasi	Sekretaris Dinas kesehatan	TB3,4	TB3,4	-terlaksana

14	Uji kompetensi	Laporan pelaksanaan dan pemantauan berkelanjutan melalui Sarana komunikasi (WA)sosialisasi,rapat koordinasi	Sekretaris Dinas kesehatan	TB 2	TB 2	-terlaksana
15	Aplikasi LPLPO dan stok opname tiap akhir bulan	Laporan pelaksanaan dan pemantauan berkelanjutan melalui Sarana komunikasi (WA)sosialisasi,rapat koordinasi	Sekretaris Dinas kesehatan	TB 1,2,3,4	TB 1,2,3,4	-terlaksana
16	Sosialisasi PI RT dan perijinan PI RT gratis	Laporan pelaksanaan dan pemantauan berkelanjutan melalui Sarana komunikasi (WA)sosialisasi,rapat koordinasi	Sekretaris Dinas kesehatan	TB 1,2	TB 1,2	-terlaksana
17	Pemeriksaan Lab Air DAM tiap 3 bulan sekali	Laporan pelaksanaan dan pemantauan berkelanjutan melalui Sarana komunikasi (WA)sosialisasi,rapat koordinasi	Sekretaris Dinas kesehatan	TB 1,2	TB 1,2	-terlaksana
18	Sosialisasi di Poskestren	Laporan pelaksanaan dan pemantauan berkelanjutan melalui Sarana komunikasi (WA)sosialisasi,rapat koordinasi	Sekretaris Dinas kesehatan	TB 3,4	TB 3,4	-terlaksana
19	Pelaksanaan Germas	Laporan pelaksanaan dan pemantauan berkelanjutan melalui Sarana komunikasi (WA)sosialisasi,rapat koordinasi	Sekretaris Dinas kesehatan	TB 1,2	TB 1,2	-terlaksana
20	Bimtek terkait UKBM pada Nakes dan Kader	Laporan pelaksanaan dan pemantauan berkelanjutan melalui Sarana komunikasi (WA)sosialisasi,rapat koordinasi	Sekretaris Dinas kesehatan	TB 1,2	TB 1,2	-terlaksana

Formulir Kertas Kerja Rancangan Pemantauan Atas Pengendalian Intern

Nama Pemda : Pemerintah Kabupaten Lamongan

Tahun Penilaian : 2023

Tujuan Strategis Pemda :

Urusan Pemerintahan : Kesehatan

Dinas Terkait : Dinas Kesehatan

No	"Risiko" yang Teridentifikasi	Kode Risiko	Kejadian Risiko			Keterangan	RTP	Rencana Pelaksanaan RTP	Realisasi Pelaksanaan RTP	Keterangan
			Tanggal Terjadi	Sebab	Dampak					
Risiko Strategis OPD Dinas Kesehatan:										
1	Pelayanan kesehatan SPM bidang Kesehatan belum maksimal	RSO.23.0 1.13.02	Maret 2023	Kegiatan tidak berjalan sesuai jadwal / belum terlaksana AKSI bergizi FERRAMEG	Tertundanya pelaksanaan pencanangan Aksi bergizi Ferrameg	Monitoring tahun 2023	1.Pemberian PMT balita Gizi buruk 2.Aksi bergizi melalui inovasi Ferameg(fe hari rabu pada remaja putri) 3.Pemanatuan EPBGGM 4.Melaksanakan On Job Training pada Nakes 5.Memberikan jaminan kesehatan masyarakat melalui LASERKU 6.Pemantauan PD3I melalui aplikasi ASIK 7.Posbindu PTM skrining pada penderita DM dan HT pemantauan laporan 8.Pelaksanaan Reakreditasi Puskesmas	TB 1,2,3,4	TB 1,2,3,4	Terlaksana

2	Tenaga kesehatan belum teregistrasi dengan bukti SIP dan STR	RSO.23.0 1.13.02	-	kelalaian nakes dalam pengurusan str dan sip Pengurusan ijin Berbelit SOP yang sulit di (OP) organisasi perawat	Kualitas pelayanan Nakes rendah sehingga terjadi ketidak puasan di masyarakat. tidak bisa praktik baik mandiri dan di instansi Nakes bisa praktik baik mandiri dan di instansi	Monitori ng tahun 2023	1.Sosialisasi pada nakes 2.pemetaan data nakes 3.Perijinan online mempercepat birokrasi 4.Uji kompetensi pada nakes	TB 1,2,3,4	TB 1,2,3,4	Terlaksana na
3	Terjadi kegagalan / keterlambatan dalam pelaksanaan pengadaan alat kesehatan,obat dan BMHP dan temuan obat expired	RSO.23.0 1.13.02	-	-dalam pelaksanaan pengadaan alkes ,obat dan BMHP seringkali tidak dilaksanakan pada awal tahun,oleh karena persyaratan pelaksanaan pengadaan belum lengkap dan alkes ,obat dan BMHP tidak tersedia di e katalog	-Terdapat beberapa alat kesehatan,obat,BM HP yang tidak tersedia di puskesmas Pemantauan ED Obat	Monitori ng tahun 2023	1.Pengentrian pengadaan alkes dan obat melalui aplikasi syrup 2.Pemantauan LPLPO dan stok opname tiap akhir bulan	TB 1,2,3,4	TB 1,2,3,4	Terlaksana na
4	Belum semua masyarakat mengikuti penumbuhan kesadaran dalam peningkatan derajat kesehatan dan lingkungan dengan menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat	RSO.23.0 2.13.02	-	-Belum semua UKBM berPHBS	-Belum semua UKBM melaksanakan indikator PHBS	Monitori ng tahun 2023	Kegiatan pemberdayaan di masyarakat melalui posyandu balita ,posyandu remaja,posyandu Lansia dan Posbindu PTM	TB 1,2,3,4	TB 1,2,3,4	Terlaksana na

Risiko Operasional OPD Dinas Kesehatan:										
1	Jumlah dokumen laporan perencanaan tidak terselesaikan tepat waktu	ROO.23.0 1.13.02	-	-Adanya intervensi dan kurangnya transparansi dalam penyusunan dokumen perencanaan dan keterlambatan dokumen pelaporan(profil,lkip,l kpd,lppd) data dari lintas bidang	-Perencanaan dan pelaporan tidak realiable	Monitori ng tahun 2023	Penguatan dari atasan kepada semua bidang u laporan tepat waktu	TB 1,2,3,4	TB 1,2,3,4	Terlaksana na
2	Penyediaan administrasi dan pelaporan keuangan tidak tepat waktu	ROO.23.0 1.13.02	-	-Ketersediaan anggran di BPKAD dan Dokumen sumber transaksi tidak lengkap atau pembuatan dokumen tidak sesuai ketentuan	-Keterlambatan penerimaan gaji / honor ASN dan PTT dan honda	Monitori ng tahun 2023	Kerangka Acuan Kerja Perencanaan Kegiatan,Dokumen Renja dan entri aplikasi SIRUP awal tahun dan perubahan	TB 1,3	TB 1,3	Terlaksana na
3	Administrasi kepegawaian tidak tercukupi dengan baik	ROO.23.0 2.13.02	-	Pagu anggaran di luar peencanaan	-Tidak terpenuhi administrasi kepegawaian	Monitori ng tahun 2023	Kerangka Acuan Kerja Renja dan entri aplikasi SIRUP awal tahun dan perubahan	TB 1,3	TB 1,3	terlaksana na
4	administrasi umum yang tidak tercukupi	ROO.23.0 2.13.02	-	-Terjadi peningkatan volume kebutuhan dan pemakaian komponen (listrik air dll)	-penyediaan komponen listrik,alat rumah tangga dan logistik kantor tidak tercukupi	Monitori ng tahun 2023	Melaksanakan inventarisasi kebutuhan	TB 1,4	TB 1,4	terlaksana na

5	Administrasi pengadaan jasa penunjang tidak tercukupi	ROO.23.0 3.13.02	-	-Terlambatnya penyusunan dokumen pengadaan jasa penunjang	-pelaksanaan pengadaan terhambat	Monitoring tahun 2023	Kerangka Acuan Kerja Renja dan entri aplikasi SIRUP awal tahun	TB 1,3	TB 1,3	terlaksana
6	Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah tidak tercukupi	ROO.23.0 3.13.02	-	-Terlambatnya pelaksanaan kegiatan	-Kegiatan penyediaan perlengkapan kantor tertunda	Monitoring tahun 2023	Updating aplikasi simela	TB 1,2,3,4	TB 1,2,3,4	terlaksana
7	Pemeliharaan barang milik daerah tidak terlaksana sepenuhnya	ROO.23.0 2.13.02	-	-Perencanaan kegiatan pemeliharaan pajak dan perijinan belum terakomodir keseluruhan	-Pemeliharaan tidak terlaksana sepenuhnya	Monitoring tahun 2023	Kerangka Acuan Kerja Renja dan entri aplikasi SIRUP awal tahun	TB 1,3	TB 1,3	Terlaksana
8	Fasilitas pelayanan kesehatan untuk ukm dan ukp belum maksimal	ROO.23.0 1.13.02	-	-Rujukan ke rumah sakit jauh dan sejumlah bangunan mengalami kerusakan serta kurang tercukupi alkes, obat dan BMHP	-Pelayanan kesehatan kepada masyarakat tidak optimal	Monitoring tahun 2023	Koordinasi lintas sektor PMK 30 th 2022 tentang mutu pelayanan ,PMK 34 th 2019 tentang puskesmas	TB 1,2,3,4	TB 1,2,3,4	Terlaksana
9	Penyediaan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP rujukan tingkat daerah kabupaten/kota tidak maksimal	ROO.23.0 1.13.02	-	-kurang koedinasii lintas program dan lintas sektor dalam pelaksanaan akreditasi dan dalam upaya peningkatan target kegiatan	-capaian SPM dan PKP belum semua 100% dan belum semua fasyankes terakreditasi dan reakreditasi	Monitoring tahun 2023	Penguatan dari atasan kepada semua bidang u laporan tepat waktu Peningkatan kapasitas tenaga Kesehatan	TB 1,2,3,4	TB 1,2,3,4	terlaksana
10	Penyelenggaraan sistim informasi kesehatan secara terintegrasi tidak tercapai	ROO.23.0 2.13.02	-	-Jaringan internet tidak stabil sering terkendala dan belum terlaksananya 1 data dengan maksimal	-Terlambatnya pelayanan kepada pasien dan data tidak realtime serta proses lama	Monitoring tahun 2023	Penambahan jaringan dan aplikasi penguatan dari atas dalam sinkronisasi satu data	TB 1	TB 1	terlaksana

11	Penerbitan izin rumah sakit kelas C dan D dan fasilitas pelayanan kesehatan tingkat Daerah Kabupaten/Kota tidak maksimal	ROO.23.0 1.13.1	-	-Belum adanya ijin memungkinkan belum tersedianya sarana dan prasarana yang memadai	-masyarakat tidak mendapatkan kualitas pelayanan yang optimal dan sesuai prosedur	Monitoring tahun 2023	Pembinaan RS dan akreditasi Fasyankes	TB 1,2,3,4	TB 1,2,3,4	terlaksana
12	Pemberian izin praktek Tenaga Kesehatan tingkat Daerah Kabupaten/Kota tidak maksimal	ROO.23.0 1.13.02	-	-persyaratan proses pengurusan ijin rumit	-Belum sepenuhnya tenaga kesehatan yang bertanggungjawab dan memiliki keahlian dan kewenangan yang terlindungi	Monitoring tahun 2023	Pembinaan nakes	TB 3,4	TB 3,4	- terlaksana
13	Perencanaan kebutuhan dan pendayagunaan SDM kesehatan untuk UKP dan UKM di wilayah Kab/kota tidak maksimal	ROO.23.0 2.13.02	-	-Penetapan jumlah ,jenis,kualifikasi dan distribusi tenaga kesehatan tidak sesuai sepenuhnya penempatan SDM sesuai dengan tupoksi	-Terjadi kesalahan dalam pendelegasian wewenang	Monitoring tahun 2023	Anjab,Bimtek tenaga kesehatan	TB3,4	TB3,4	- terlaksana
14	Pengembangan mutu dan peningkatan kompetensi teknis sumber daya manusia kesehatan tingkat daerah kabupaten / kota tidak maksimal	ROO.23.0 2.13.02	-	-Tim penguji yang tersertifikasi internal belum tersedia di daerah	-Tertundanya kenaikan jabatan pejabat fungsional kesehatan karena belum uji kompetensi	Monitoring tahun 2023	Uji kompetensi	TB 2	TB 2	- terlaksana

15	adanya Temuan obat yang tidak memenuhi syarat / kadaluarsa maka dapat mengganggu kesehatan masyarakat bahkan kematian	ROO.23.0 1.13.1	-	-Tingkat penegetahuan dan pelakuk usaha apotik masih kurang	-Beredarnya sedian farmasi (obat, obat tradisional, alkes, PKRT), dan kosmetik yang tidak memenuhi syarat dan expired di masyaraka	Monitoring tahun 2023	Aplikasi LPLPO dan stok opname tiap akhir bulan	TB 1,2,3,4	TB 1,2,3,4	- terlaksana
16	Penerbitan sertifikat produksi pangan industri rumah tangga dan nomor P-IRT sebagai izin produksi untuk produk makanan minuman tertentu yang dapat diproduksi oleh industri rumah tangga tidak maksimal	ROO.23.0 3.13.02	-	-Uji sample makanan berbahaya	-Usaha makanan skala rumahan belum berijin dan kontaminasi pada pangan selama proses produksi berlangsung	Monitoring tahun 2023	Sosialisasi PIRT dan perijinan PIRT gratis	TB 1,2	TB 1,2	- terlaksana
17	Kurang terjaminya keamanan masyarakat sebagai konsumen (pembeli)warung,restoran,dan depo air minum/DAM	ROO.23.0 3.13.02	-	-pengelolaan DAM yang tidak sesuai perda dan lingkungan kurang memenuhi syarat TPM	-Masih muncul maslah kesehatan dan KLB (diare)	Monitoring tahun 2023	Pemeriksaan Lab Air DAM tiap 3 bulan sekali	TB 1,2	TB 1,2	- terlaksana
18	Advokasi,pembedayaan,kemitraan peningktan peran serta masyarakat dan lintas sektor tingkat daerah kabupaten / kota tidak maksimal	ROO.23.0 3.13.02	-	-pemberdayaan di pesantren kurang sehingga ketidakmampuan mendeteksi dan menyelesaikan masalah kesehatan	-Muncul permasalahan kesehatan yang tidak di waspada	Monitoring tahun 2023	Sosialisasi di Poskestren	TB 3,4	TB 3,4	- terlaksana

19	Pelaksanaan sehat dalam rangka promotif dan preventif tingkat daerah kabupaten / kota tidak diterapkan	ROO.23.0 3.13.02	-	-Promosi dan informasi tidak dikembangkan secara optimal sehingga informasi kesehatan pada masyarakat tidak tersampaikan dengan baik	-Masyarakat masih tergantung dengan pemerintah dan fsyankes akan penyelesaian masalah kesehatan	Monitoring tahun 2023	Pelaksanaan Germas	TB 1,2	TB 1,2	- terlaksana
20	Pengembangan dan pelaksanaan upaya kesehatan bersumber daya masyarakat (UKBM) tingkat daerah kabupaten / kota tidak maksimal	ROO.23.0 3.13.02	-	-pengetahuan petugas kesehatan dan kader masih kurang serta peran serta masyarakat yang kurang	-UKBM Tidak berkembang	Monitoring tahun 2023	Bimtek terkait UKBM pada Nakes dan Kader	TB 1,2		

LAPORAN PENGELOLAAN RISIKO TRIBULAN II TAHUN 2023



DINAS KESEHATAN
KABUPATEN LAMONGAN